

Pengembangan UMKM melalui Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi

Adibah Yahya^{1*}, Indra Permana², Meli Andriyani³, Nisa Zhafira⁴, Sahlaa Tsabita⁵

^{1,2,4,5} Universitas Pelita Bangsa, Jl. Inspeksi Kalimalang Arah Deltamas, Kabupaten Bekasi 17540, Indonesia

³ Universitas IPWIJA, Jl. Letda Nasir No.7, Nagrak, Kec. Gn. Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16967, Indonesia

¹ adibah.yahya@pelitabangsa.ac.id *; ² indra.permana@pelitabangsa.ac.id ; ³ my.odah@yahoo.com ;

⁴ nisazhafira44@gmail.com; ⁵ sahlaatsabitah2200@gmail.com

* **corresponding author : Adibah Yahya**

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 23-12-2024

Revised : 04-01-2025

Accepted : 22-01-2025

Keywords

MSMES;

complete data collection;

economic development;

ABSTRACT

The Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (KUMKM) conducts data collection to collect accurate and integrated data to formulate more effective policies in protecting and empowering MSMEs. The data collection target in 2024 includes 4 million data from five provinces, with Bekasi District targeting 100,000 data. To ensure broad participation, this activity involves various parties, including practitioners, academics, and communities. The data collection aims to address issues faced by MSMEs, such as lack of accurate data, access to financing, and training support. Through systematic methods, including the formation of teams and the use of mobile applications for data collection, it is hoped that this data collection can increase the economic potential of MSMEs and positively contribute to the local economy. The results of this activity show that collaboration between government, academia, and the community can improve the effectiveness of MSME development in Bekasi District. The results of this activity also showed an exceeding of the data collection target by 100.08%.

A. PENDAHULUAN

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) terus melaksanakan pendataan lengkap (PL) menyeluruh terhadap UMKM (PL-UMKM) yang memenuhi standar dan berkualitas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Terutama dalam konteks upaya pemerintah untuk melindungi, memberikan kemudahan, dan memberdayakan koperasi serta UMKM di Indonesia, target pendataan lengkap UMKM pada tahun 2024 mencakup 4 juta data yang berasal dari empat provinsi dan 61 kabupaten (Hakim, 2024).

Target pencapaian sebaran data untuk dilakukan pendataan lengkap terdiri dari Jawa Barat (1.543.000), Jawa Tengah (1.059.000), Jawa Timur (1.128.000), dan Banten (270.000). Untuk wilayah Jawa Barat disebar pada 19 Kabupaten/Kota. Wilayah Kabupaten Bekasi mendapat target pencapaian sebanyak 100.000 data, sebaran tersebut dibagi ke beberapa kelompok kerja di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Adapun penyebaran tersebut dilakukan guna memenuhi target yang akan dicapai, strategi yang dilakukan dalam memenuhi target dengan melibatkan praktisi dan akademisi di wilayah Kabupaten Bekasi.

Mitra yang terlibat dalam kegiatan pendataan terdiri dari unsur pemerintah yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi, Forum UMKM di setiap Desa, Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Bekasi, dan masyarakat umum. Pendataan tersebut dilakukan guna melanjutkan hasil evaluasi pendataan KUMKM pada tahun 2022, dimana sasaran pendataan adalah masyarakat umum yang memiliki usaha dengan kategori aladin (alas, lantai, dan dinding). Sedangkan untuk pendataan di tahun 2024 lebih mengarah pada usaha pedagang keliling atau tidak tetap.

Kegiatan PL-KUMKM 2024 mencakup seluruh UMKM, dengan bangunan tidak tetap, seperti kaki lima atau usaha keliling yang berada dalam batas-batas wilayah Indonesia. Aktivitas ekonomi yang dicatat mencakup seluruh kategori/lapangan usaha kecuali Kategori A, O, T, dan U.



CAKUPAN UNIT USAHA

Kegiatan PL-KUMKM 2024 mencakup seluruh **UMKM**, dengan bangunan tidak tetap, seperti kaki lima atau usaha keliling yang berada dalam batas-batas wilayah Indonesia. Aktivitas ekonomi yang dicatat mencakup seluruh kategori/lapangan usaha **kecuali** Kategori A, O, T, dan U.

Kategori	Deskripsi	Kategori	Deskripsi
B	Pertambangan dan Pengalihan	N	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
C	Industri Pengolahan	P	Pendidikan, kecuali pendidikan yang dikelola oleh pemerintah (8511, 85131, 8521, 8523, 8531, 8543)
D	Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas, dan Udara Dingin	Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial; kecuali aktivitas sosial di dalam panti (golongan pokok 87); aktivitas sosial tanpa akomodasi (golongan pokok 88); dan Aktivitas Kesehatan Manusia yang dikelola oleh pemerintah (86101, 86102, 86104)
E	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	R	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi, kecuali Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya yang dikelola oleh pemerintah (91011, 91021, 91023), dan Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan (golongan pokok 92).
F	Konstruksi	S	Aktivitas Jasa Lainnya, kecuali layanan kencana di dalam kelompok 96999 dan Aktivitas Keanggotaan Organisasi (golongan pokok 94)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor		
H	Pengangkutan dan Pergudangan		
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum		
J	Informasi dan Komunikasi		
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi		
L	Real Estat		
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis		

Gambar 1. Kriteria pendataan usaha UMKM

Pendataan lengkap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor ini dan memaksimalkan potensi ekonominya. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya data yang akurat dan terintegrasi di banyak daerah, yang menyulitkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan mengarahkan sumber daya secara efektif. Selain itu, banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan akses pembiayaan karena kurangnya informasi kredibel mengenai usaha mereka (Asiah et al., 2024), sehingga lembaga keuangan kesulitan menilai risiko dan potensi UMKM. Minimnya dukungan pelatihan dan pengembangan juga menjadi kendala karena tanpa data yang jelas mengenai kebutuhan pelatihan, banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka (Permatasari et al., 2024).

Tantangan dalam pemasaran juga dihadapi oleh UMKM, terutama karena kurangnya informasi pasar dan strategi pemasaran yang efektif (Widati et al., 2024). Pendataan yang baik dapat membantu mengidentifikasi peluang pasar dan cara untuk mengaksesnya salah satunya melalui pembuatan (NIB) Nomor Induk Berusaha (Harisandi et al., 2024) dan sertifikasi halal (Nurjanah et al., 2022). Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas, seperti akses ke teknologi, transportasi, dan fasilitas produksi, serta permodalan juga sering menjadi hambatan bagi UMKM (Adibah, 2018). Selain itu, dalam situasi ekonomi yang dinamis, seperti dampak pandemi COVID-19 (Syah & Syafgani, 2021), pendataan rutin dan lengkap sangat penting untuk memahami bagaimana UMKM beradaptasi dan berkembang dalam kondisi yang sulit (Hidayat et al., 2024). Dengan pendataan yang lengkap, diharapkan berbagai permasalahan ini dapat diatasi dan potensi ekonomi UMKM dapat dimaksimalkan.

Untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan, program pendampingan keuangan dapat dikembangkan, membantu pelaku UMKM dalam menyusun proposal bisnis yang baik (Yahya, et al., 2024), serta mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk menciptakan produk pembiayaan yang lebih fleksibel. Minimnya dukungan pelatihan dan pengembangan dapat diatasi dengan menyelenggarakan pelatihan terfokus dan program mentoring, di mana pelaku UMKM yang lebih berpengalaman membimbing yang baru (Yahya, et al., 2024). Tantangan dalam pemasaran dapat diatasi dengan mengembangkan platform pemasaran digital (Rustianah et al., 2024) dan mengorganisir kampanye pemasaran bersama untuk meningkatkan visibilitas produk UMKM (Magdalena et al., 2021).

Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas dapat diatasi melalui investasi dalam infrastruktur yang mendukung UMKM, serta menggandeng sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan fasilitas produksi. Dalam menghadapi kondisi ekonomi yang dinamis, penting bagi UMKM untuk mengadaptasi strategi bisnis yang fleksibel, serta mendapatkan dukungan dalam penelitian pasar untuk

memahami tren dan kebutuhan konsumen (Yuningsih et al., 2023). Terakhir, kampanye kesadaran dan edukasi tentang hak-hak pelaku UMKM serta kebijakan yang ada dapat meningkatkan pemahaman mereka, sehingga mereka dapat memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan UMKM dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat (Nurjanah et al., 2024).

Tujuan kegiatan ini untuk mendukung program pemerintah guna membantu proses pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi UMKM di Indonesia menjadi lebih mudah. Adanya urgensi pembangunan Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM dalam rangka penyediaan Satu Data KUMKM yang akurat dan menyeluruh (Hanafi et al., 2023). Universitas Pelita Bangsa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pendataan lengkap KUMKM dengan melibatkan dosen, tendik, dan mahasiswa. Pembentukan satuan tugas dengan menentukan tugas koordinator sebagai verifikator, dan enumerator sebagai pihak yang melakukan pendataan lengkap di lapangan.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Metode Pendataan berfokus pada usaha yang tidak menetap, yang dicirikan dengan usaha keliling, pedagang kaki lima dan lainnya. Adapun kriteria usaha mengacu pada Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan KUMKM (Hakim, 2024). Untuk Untuk memperlancar pelaksanaan seluruh kegiatan PL-KUMKM Tahun 2024, dibentuk organisasi lapangan mulai dari Deputi sampai dengan para pelaksana lapangan di tingkat Kabupaten/Kota.



Gambar 1. Garis komando pendataan lengkap KUMKM

Pada Gambar 1 menunjukkan alur proses pendataan, dimulai dari Deputi yang memberikan instruksi ke Organisasi Perangkat daerah (OPD) Provinsi, kemudian diteruskan ke OPD Kabupaten/Kota. Setelah itu, tim pokja pendataan akan melakukan pengumpulan data, dilanjutkan dengan verifikasi data oleh Verifikator. Kemudian, Koordinator Enumerator akan menugaskan Enumerator untuk melakukan pendataan lapangan. Koordinator dan Enumerator adalah petugas yang diusulkan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kab/Kota terpilih.

Seorang Koordinator akan mengkoordinir 1-2 enumerator dan bertanggungjawab sebagai garda terdepan penyelesaian masalah di lapangan sehingga target dapat terlaksana sesuai periode pendataan dan memverifikasi hasil pendataan enumerator. Sedangkan tugas enumerator adalah melakukan wawancara dan pengisian kuesioner pendataan dengan sarana pendataan yang tersedia (mobile aplikasi/form kuesioner) sesuai target dan jangka waktu pendataan. Target pendataan untuk wilayah Kabupaten Bekasi sebesar 100.000 pelaku UMKM yang tersebar di 23 Kecamatan dan 187 Desa (Bekasikab.bps.go.id, 2024).

Berikut langkah pelaksanaan kegiatan PL-KUMKM.

1. Pada awal pelaksanaan mendapat komando dari Deputi kemudian diteruskan pada OPD Provinsi dan Kabupaten/kota.
2. Setelah mendapatkan garis komando dan tugas selanjutnya enumerator melaksanakan pendataan langsung ke lapangan dengan membawa surat tugas yang telah diberikan oleh tim Pokja Kabupaten Bekasi.
3. Pendataan yang telah selesai dilakukan kemudian didata ke dalam website untuk diverifikasi ke koordinator
4. Koordinator akan memeriksa data yang telah diajukan oleh enumerator, jika data lengkap maka diverifikasi jika tidak lengkap atau terdapat kekeliruan maka data ditolak untuk kemudian dilakukan perbaikan oleh enumerator
5. Setelah melakukan perbaikan, enumerator dapat mengajukan kembali data yang ditolak sesuai dengan catatan perbaikan koordinator
6. Data akan dievaluasi setiap minggu oleh koordinator terkait tingkat pencapaian target yang telah

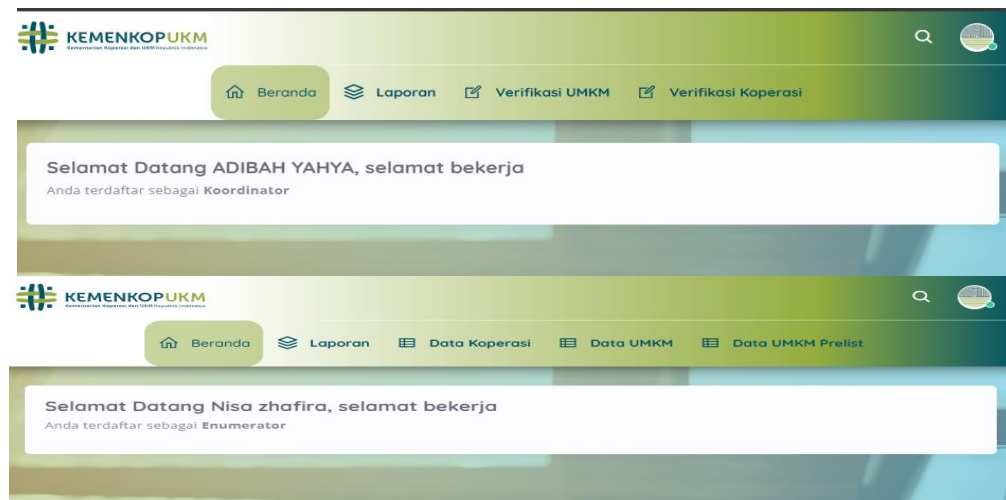
ditentukan

7. Hasil evaluasi akan dilanjutkan ke tim Pokja guna menentukan keaktifan dan ketidakaktifan enumerator dan koordinator untuk ditindak lanjuti.



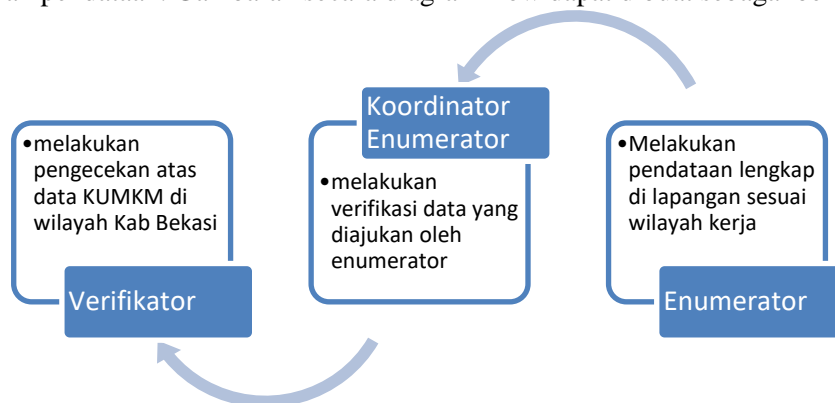
Gambar 2. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Gambaran IPTEKS atas kegiatan ini dapat dilihat pada website sebagai berikut <https://satudata.kemenkopukm.go.id/>



Gambar 4. Tampilan sistem PL-KUMKM

Tampilan pada gambar 4, menunjukkan akun yang dimiliki koordinator dan enumerator dalam melaksanakan pendataan. Gambaran secara diagram flow dapat dibuat sebagai berikut:



Gambar 5. Diagram flow kegiatan pendataan

Penjelasan mengenai Gambar 5, sebagai berikut:

1. Enumerator melakukan pendataan lengkap di lapangan sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan, kemudian mengajukan data ke dalam sistem basis data tunggal KUMKM.
2. Koordinator melakukan pengecekan data dengan melihat data verifikasi KUMKM, kemudian memverifikasi data tersebut jika telah sesuai, namun jika belum sesuai maka koordinator berhak menolak ajuan.
3. Enumerator akan melakukan perbaikan sesuai dengan catatan koordinator untuk mengajukan

- kembali data yang tertolak
4. Tim verifikator akan melakukan pengecekan secara menyeluruh terkait jumlah target pencapaian setiap minggunya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PL-KUMKM merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan semua unsur, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, forum UMKM, masyarakat, serta akademisi dalam hal ini perguruan tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Pelaksanaan pendataan tersebut dimulai sejak bulan Juli – November 2024. Adapun tahapan awal pelaksanaan pendataan dimulai dengan perekrutan, bimbingan teknis, dan evaluasi kepada seluruh perangkat kerja, mulai dari pemerintahan daerah hingga seluruh unit yang bertugas. Pelaksanaan bimbingan teknis atas tugas yang dilakukan oleh bagian pendataan yang disebut sebagai koordinator dan enumerator dilaksanakan pada 14 Juli 2024.



Gambar 6. Bimbingan Teknis Pendataan Lengkap KUMKM

Bimbingan teknis pendataan lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pelaku KUMKM dalam mengelola usaha mereka dengan baik. Fokus utama bimbingan ini adalah memastikan pemahaman tentang pentingnya pendataan yang akurat dan terintegrasi, serta cara melakukan pendataan dengan benar. Selain itu, bimbingan ini bertujuan memperbaiki akurasi dan integrasi data KUMKM, sehingga pemerintah dan lembaga terkait dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran berdasarkan data tersebut. Pendataan lengkap juga membantu pelaku KUMKM menyediakan informasi kredibel kepada lembaga keuangan, mempermudah akses mereka ke pembiayaan.

Tahap berikutnya yaitu pelaksanaan kegiatan, adapun kegiatan ini dilakukan oleh enumerator selaku pelaksana lapangan. Enumerator melakukan koordinasi atas wilayah pendataan dengan pimpinan desa setempat, hal ini untuk memastikan bahwa pendataan yang dilakukan merupakan pendataan resmi dengan melampirkan surat tugas dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi.



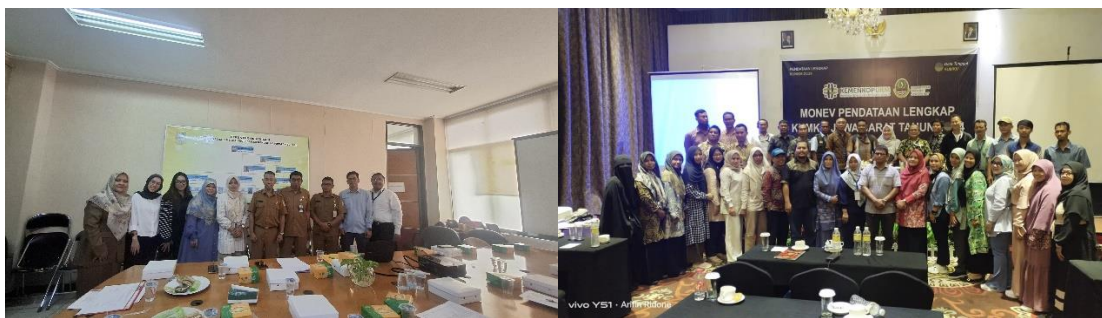
Gambar 7. Koordinasi dengan pimpinan wilayah setempat

Selanjutnya enumerator melakukan wawancara kepada pelaku UMKM dan memasukkan data ke dalam aplikasi yang telah disampaikan pada saat bimbingan teknis. Data yang diinput kemudian diajukan untuk diverifikasi oleh koordinator. Atas pendataan tersebut koordinator akan memberikan keputusan hasil verifikasi tersebut apakah diterima atau ditolak datanya. Apabila terjadi penolakan data, maka enumerator bertugas untuk memperbaiki data sesuai dengan catatan yang dilakukan oleh koordinator.



Gambar 8. wawancara dengan pelaku UMKM

Target pencapaian data pelaku UMKM di wilayah Kabupate Bekasi sebanyak 100.000 pelaku UMKM. Setiap enumerator memiliki target pencapaian data sebanyak 300 data pelaku UMKM yang dimasukkan ke dalam aplikasi selama 3 (tiga) bulan, yaitu dari bulan September – November 2024. Selama pendataan berlangsung tim pokja akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait pencapaian data UMKM sebanyak 100.000 data. Pada awal pendataan, terdapat monev mengenai kesulitan enumerator dalam meyakinkan pelaku UMKM atas pendataan yang dilakukan, sehingga di bulan pertama pendataan belum mencapai target yang diharapkan. Namun pada akhir bulan pendataan, Kabupaten Bekasi dapat mencapai melampaui target yaitu sebanyak 100.075 pelaku UMKM yang terverifikasi datanya di aplikasi.



Gambar 9. Monitoring dan evaluasi pendataan lengkap KUMKM

D. PENUTUP

Kegiatan PL-KUMKM di Kabupaten Bekasi merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, forum UMKM, masyarakat, dan akademisi. Pendataan dilakukan dari Juli hingga November 2024, dimulai dengan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi koordinator dan enumerator pada 14 Juli 2024. Enumerator kemudian turun ke lapangan, berkoordinasi dengan pimpinan desa setempat, dan menginput data UMKM yang diverifikasi oleh koordinator. Meskipun awalnya menghadapi tantangan, target pendataan 100.000 pelaku UMKM berhasil dicapai dan bahkan melampaui dengan 100.075 atau pelampauan sebesar 100,08% data terverifikasi. Selama proses pendataan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kelancaran dan keakuratan data yang dikumpulkan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa dengan kerja sama yang baik, pengembangan UMKM di Kabupaten Bekasi dapat ditingkatkan secara signifikan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi Ibu Dra. Hj. Ida Farida, M.Si. beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada Universitas Pelita Bangsa dalam PL-KUMKM. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Pelita Bangsa Bapak Hamzah Muhammad Mardiputra, S.K.M., M.M., DBA dan jajarannya atas perhatian dan bantuannya untuk kelancaran kegiatan PL-KUMKM. Serta kepada seluruh koordinator dan enumerator yang telah menjalankan tugas sehingga terwujudnya pencapaian target, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiah, N., Yahya, A., Asti, E. G., Permana, I., Hidayat, N. P., & Muarif, D. S. (2024). Peningkatan Kompetensi UMKM dalam Penyusunan Anggaran Penjualan di Cikarang Pusat. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 165–171. <https://doi.org/10.31334/jks.v6i2.3506>
- Bekasikab.bps.go.id. (2024). *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi, 2023*. Bekasi.kab.Go.Id. <https://bekasikab.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bekasi--2023.html?year=2023>
- Hakim, A. R. (2024). *Kemenkop UKM terus lakukan pendataan lengkap UMKM*. Antaranews.Com. [https://www.antaranews.com/berita/4248327/kemenkop-ukm-terus-lakukan-pendataan-lengkap-umkm#:~:text=Jakarta \(ANTARA\) - Kementerian Koperasi,yang lebih efektif dan efisien.](https://www.antaranews.com/berita/4248327/kemenkop-ukm-terus-lakukan-pendataan-lengkap-umkm#:~:text=Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi,yang lebih efektif dan efisien.)
- Hanafi, Saptawan, A., & Nengyanti, N. (2023). Kinerja Implementasi Kebijakan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2022 di Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 325–337. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3582>
- Magdalena, H., Santoso, H., & Septryanti, A. (2021). Sistem Informasi Aplikasi Pendataan (SIAP) UMKM Berbasis Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Abdidas*, 2(3), 581–596. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i3.328>
- Nurjanah, R., Andriyani, M., Nurastuti, P., Muiz, N. T. el, & Rukoyah, S. (2024). *Abdimas galuh*. *Abdimas Galuh*, 6(2), 1195–1202. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ag.v6i2.14546>
- Rustianah, R., Hariroh, F. M. R., Soleha, E., & Hidayah, Z. Z. (2024). Pengembangan Strategi Bisnis UMKM Berbasis Digital untuk Membangun Mental Technopreneur. *Lentera Pengabdian*, 2(01), 24–28. <https://doi.org/10.59422/lp.v1i04.252>
- Yahya, A., Ayunngtyas, E. A., Putri, L. A., & Ningrum, S. M. (2024). Peningkatan Kompetensi Tata Kelola Keuangan Usaha Mikro Bakso Senggol Desa Pasir Gombang Cikarang Kabupaten Bekasi. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 126–131. <https://doi.org/10.31334/jks.v7i1.3762>
- Yahya, A., Hidayat, T., Saputera, D., Muhsoni, R., & Ramdani, C. (2024). Pendampingan Pembuatan Proposal Bisnis “Mak Enjoeh.” *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Mengabdikan Untuk Negeri*, 6(2), 456–461. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/j.pdl.v6i2.37934>
- Yuningsih, N., Asral, & Prasetyo Harisandi. (2023). Pemberdayaan Dan Pemasaran Produk Umkm Kab.Bekasi Melalui Bazar Umkm. *Jurnal Pengabdian Bersama Masyarakat Indonesia*, 1(1), 16–21. <https://doi.org/10.59031/jpbmi.v1i1.39>